



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Otto Parorrongan, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Jabatan : Sekretaris Jenderal

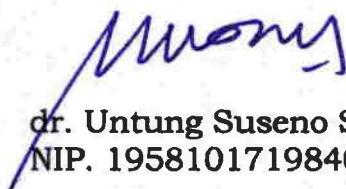
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

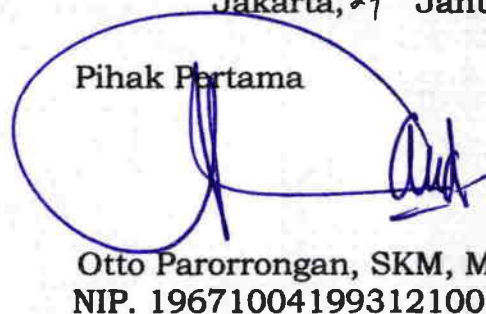
Pihak pertama selaku Kepala Satuan Kerja pelaksana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya dan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kementerian Kesehatan TA 2016. Menyatakan, akan melaksanakan menu kegiatan dekonsentrasi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/182/2016 tentang alokasi Anggaran Dekonsentrasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Tahun 2016.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2016

Pihak kedua,


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004

Pihak Pertama

Otto Parorrongan, SKM, M. Kes
NIP. 196710041993121003

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
Tahun : 2016

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA	1. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	
1.	Pembinaan Administrasi kepegawaian	1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan	Pengangkatan dan Pengelolaan administrasi tenaga PTT/P3K/Penugasan Khusus
2.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	1. Persentase satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan WTP	Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan BMN Satker Dekonsentrasi
3.	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	1. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas	Melakukan koordinasi lintas sektor/lintas program
4.	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji	1. Persentase pembayaran gaji dan atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran	Laporan kegiatan dan pembinaan gaji dan tata usaha
5.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1. Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas	Mengelola data dan informasi daerah (dekon)
		2. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukan pelaksanaan e-kesehatan	
6	Peningkatan Kesehatan Jemaah	1. Persentase hasil pemeriksaan kesehatan	Rekrutment Petugas

	Haji	jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) dan Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji Indonesia
2.	PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS)	
1.	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS))	1. Jumlah dokumen hasil studi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS	Penguatan SDM Pusat dan Daerah Dalam Pelaksanaan dan Pembiayaan JKN/KIS

Program

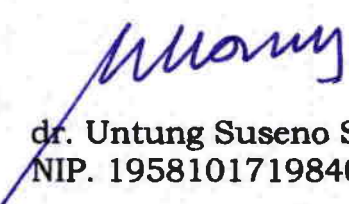
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)) Kementerian Kesehatan T.A 2016

Anggaran

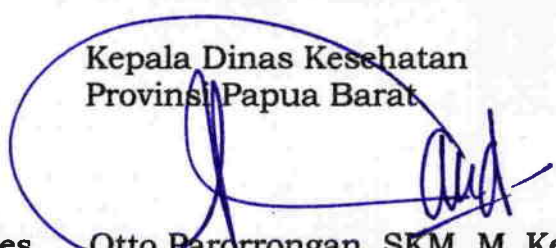
- Rp. 4.664.300.000,-
Rp. 1.232.270.000,-

Jakarta, 27 Januari 2016

Sekretaris Jenderal


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat


Otto Pardarrongan, SKM, M. Kes
NIP.196710041993121003